

**ANALISIS KEBIJAKAN DOKUMEN RKK PENAWARAN PADA PT X
DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM *INTERNATIONAL SUSTAINABILITY
RATING SYSTEMS (ISRS)* SEBAGAI MENINGKATKAN KINERJA
KESELAMATAN KONSTRUKSI *SUBCONTRACTOR***

Sandhy Cahyadi¹, Baiduri Widanarko², Rossy Armyn Machfudiyanto³

Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas
Indonesia^{1,2}, Departemen Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia³
sandhy.cahyadi@office.ui.ac.id¹, baiduri.widanarko@gmail.com², rossyarmyn@eng.ui.ac.id³

ABSTRACT

The root causes of most industrial accidents have been linked to process safety issues ranging from poor safety culture, lack of communication, asset integrity issues, lack of management leadership and human factors as well as inappropriate policies. This accident can be prevented with adequate application of process safety management (PSM). The process of selecting a Subcontractor, who will be appointed in a job, is the first step to run a company system as prevention, supervision, implementation and quality improvement in a job. In this research conducted by Delphi. This research was conducted from February 2022 to June 2022. Data collection techniques were through direct observation and review of company documents guided by RKK offers which will be analyzed according to the guidelines of the International Sustainable Rating System (ISRS). Another goal is that if this policy document is carried out in a more appropriate manner, then it is certain that it can improve the diving performance of subcontractor construction and from the government side so that the Ministry of Public Works and Public Housing can form an assessor team during the initial vendor selection inspection, and further develop the points which can cover to ensure that the subcontractor or vendor has carried out document policies in accordance with the rules of the applicable International Sustainability Rating System (ISRS). And for the company to be able to display an increase in construction safety performance.

Keywords : *Process Safety Management, Subcontractors, construction safety performance, Prevention, Monitoring, Implementation and ISRS*

ABSTRAK

Akar penyebab sebagian besar kecelakaan industri telah dikaitkan dengan masalah proses keselamatan mulai dari budaya keselamatan yang buruk, kurangnya komunikasi, masalah integritas aset, kurangnya kepemimpinan manajemen dan manusia faktor serta kebijakan yang kurang tepat. Kecelakaan dapat dicegah dengan penerapan yang memadai dari *process safety management* Proses pemilihan *Subcontractor*, yang akan di tunjuk di dalam sebuah pekerjaan, merupakan langkah awal untuk menjalankan sebuah sistem perusahaan sebagai pencegahan, pengawasan, implementasi serta peningkatan mutu di dalam sebuah pekerjaan. Penelitian dilakukan secara delphi. Penelitian dilakukan pada bulan febuari 2022 sampai dengan juni 2022. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung dan telaah dokumen perusahaan yang berpedoman pada RKK penawaran yang akan di analisis ke dalam pedoman dari *International Sustainable Rating System (ISRS)*. Tujuan lainnya juga adalah jika kebijakan dokumen ini di lakukan secara lebih sesuai maka, sudah dipastikan bisa meningkatkan kinerja keselaman konstruksi subkontraktor dan dari sisi pemerintahan agar dari pihak kementerian PUPR bisa membentuk *assessor team* pada saat pemeriksaan seleksi vendor di awal, dan mengembangkan lagi poin yang bisa mengcover untuk meyakinkan bahwa *subcontractor* ataupun vendor telah menjalankan kebijakan dokumen yang sesuai dengan aturan pada *International Sustainability Rating System* yang berlaku. Dan bagi perusahaan agar bisa menampilkan peningkatan kinerja keselamatan konstruksi.

Kata kunci : *Process Safety Management, Subcontractor, kinerja keselamatan konstruksi, Pencegahan, Pengawasan, Implementasi, dan ISRS*

PENDAHULUAN

Pengembangan kebijakan dokumen dalam pekerjaan di sektor konstruksi akan meningkatkan keselamatan konstruksi jauh lebih baik. Dengan program rencana keselamatan konstruksi (RKK), di fungsikan agar tahapan pemilihan subkontraktor pada pekerjaan konstruksi dapat terlaksana sesuai dengan peraturan, terkhususnya pada tahapan RKK penawaran. Sehingga, si pemberi kerja dapat meyakinkan bahwa setiap subkontraktor yang akan terlibat telah menjalankan *process safety* yang benar sesuai PERMEN PUPR 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Pada tahapan RKK penawaran, di fungsikan sebagai tahapan seleksi awal pada vendor ataupun subkontraktor sebelum dilanjutkan pada tahapan RKK pelaksanaan. Sistem RKK ini selalu digunakan pada sektor konstruksi sebelum sebuah *project* berjalan. Salah satunya program atau sistem RKK ini masih di jalankan pada PT X. Permasalahan pada tahapan RKK ini adalah seringnya diperuntukan hanya dokumen pelengkap dan dari elemen yang terdapat di PERMEN PUPR 10 tahun 2021, tidak mencakup keseluruhan yang diharapkan dalam sebuah *process safety* yang baik. Elemen yang tertera pada PERMEN PUPR 10 tahun 2021 seperti, kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, perencanaan keselamatan konstruksi, dukungan keselamatan konstruksi, operasi keselamatan konstruksi serta evaluasi kinerja keselamatan konstruksi masih dirasa kurang cukup untuk menutupi *gaps* yang ada pada *standard process safety* yang diharapkan. Tidak adanya penetapan risiko pekerjaan, serta tidak adanya *team assessor* yang terlibat selama proses RKK penawaran ini, membuat semakin menunjukkan bahwa proses yang dijalankan masih kategori berisiko dan menghasilkan risiko yang besar dikarenakan tidak terdapatnya

penilaian yang baik. Sehingga, risiko kecalakan kerja di area konstruksi sulit ditekan dan selalu berada di tingkat teratas dibandingkan dengan sektor industri lainnya.

Lebih dari 250 juta kasus kecelakaan terjadi di tempat kerja dan lebih dari 160 juta pekerja sakit karena bahaya sedang bekerja. Selain itu, 1,2 juta pekerja meninggal sebagai akibat kecelakaan dan penyakit di tempat kerja (Internasional Organisasi Ketenagakerjaan, 2013). Menurut situs web Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia, kasus kecelakaan kerja masih sangat tinggi setiap tahun. Berdasarkan data dari Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, ada sekitar 1.877 kecelakaan kerja di sector konstruksi sepanjang tahun 2017. Ketenagkerjaan mencatat ada 114.235 kasus kecelakaan kerja terjadi sepanjang tahun 2019. Dan pada januari – oktober tahun 2020, jumlah kecelakaan meningkat di area konstruksi sebanyak 177.161 kasus kecelakaan kerja.

Ketidakpastian dalam sebuah kejadian kecelakaan, yang menegaskan kembali untuk mendorong dan mendesak dilakukan pendekatan secara *preventif* daripada teknik reaktif (Theophilus et al.,2018). Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang disebabkan oleh bahaya yang ada di tempat kerja dan perilaku tidak aman yang menyebabkan kerugian bagi pekerja maupun pengusaha dalam aspek material dan non material (Bird, Germain dan Clark, 2003). Dan memiliki perdebatan besar tentang faktor pembeda antara keselamatan proses dan keselamatan kerja. Namun, perlu dicatat bahwa keselamatan kerja, tidak seperti proses keselamatan, hanya berfokus pada bahaya di tempat kerja seperti terpeleset, tersandung, dan jatuh (Cheng et al., 2013). Ada konsekuensi mengerikan yang terkait dengan kegagalan keselamatan proses, yang sebagian besar dapat menyebabkan banyak kematian, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, tuntutan pidana, kerusakan reputasi perusahaan dan

implikasi keuangan yang besar (Ismail et al., 2014).

Contoh kecelakaan yang terjadi di Indonesia adalah *crane* pengangkut beton proyek *double double track* (DDT) pada tahun 2018, yang menelan korban sebanyak 4 orang. Beton *girder* proyek LRT pulo gebang, pada tahun 2018 yang mengakibatkan 5 pekerja proyek mengalami luka. Proyek *light rail transit* (LRT) di Palembang pada tahun 2017, yang memakan korban sebanyak 2 orang. Sehingga, beberapa subjek terdampak atas kejadian tersebut yang di alami, antara lain Tenaga kerja, mendapatkan dampak cedera, luka hingga meninggal dan menimbulkan keraguan bagi tenaga kerja lain. Masyarakat, merasa tidak aman dan nyaman baik tinggal di area proyek ataupun yang melintasi area proyek. Proyek, pembangunan terhenti sementara dan membuat proyek jadi terlambat dan tidak tepat waktu. *Cost* bertambah karena adanya pekerja dan peralatan yang *idle*. Perusahaan, di anggap tidak kompeten dan nilai saham perusahaan menurun. Negara, dinilai belum mampu melaksanakan pembangunan dengan selamat.

Akar penyebabnya dari sebuah kecelakaan telah dikaitkan dengan kegagalan proses keselamatan mulai dari budaya keselamatan yang buruk, kurangnya komunikasi, masalah integritas aset, kurangnya kepemimpinan manajemen dan faktor manusia (Hsu et al., 2015). Tidak hanya itu, faktor sebuah kebijakan juga dapat mempengaruhi dari dampak kinerja yang bermuara terhadap sukses atau tidaknya dalam sebuah pekerjaan. Hakikatnya, kebijakan dibuat sebagai bentuk etos kerja yang dimana dalam kebijakan tersebut layaknya menjawab suatu masalah, upaya memecahkan, mengurangi serta mencegah suatu masalah dengan cara tertentu dengan tindakan yang terarah (Hoogerwerf 1988:66).

Akibat dari kejadian ataupun kecelakaan di area konstruksi, dimulai dari *poor policy*. Pengawasan dari penilain

awal kepada vendor ataupun subkontraktor tidak mencakup keseluruhan *process* yang ada. Sehingga, memerlukan sebuah sistem yang bisa diyakini dapat mencakup keseluruhan kebijakan dokumen keselamatan kinerja *subcontractor*.. Mengacu pada PERMEN PUPR 10 tahun 2021 ini perlunya pengkajian dokumen yang dimana bisa merujuk kepada *international sustainability rating system* (ISRS).

Penelitian ini dirasa sangat penting dikarenakan pada proses rencana keselamatan kerja (RKK) penawaran, masih dirasa kurang untuk memastikan bahwa vendor ataupun subkontraktor yang akan terlibat memiliki *process safety* yang baik. Sehingga, diperkirakan risiko – risiko yang tinggi selalu ditemukan dilapangan dan tidak menutup kemungkinan kematian akan terjadi selama pekerjaan berlangsung. Hal tersebutlah yang menjadi dasar utama dan perhatian peneliti dalam meneliti risiko atau *process safety* apa saja yang mengakibatkan vendor ataupun subkontraktor *improper*.

Elemen – elemen yang telah diterapkan dalam PERMEN PUPR 10 tahun 2021, pada *international sustainability rating system* (ISRS) agar dapat meningkatkan keselamatan kerja konstruksi pada *subcontractor*. Sehingga, keselamatan kerja konstruksi pada tahapan RKK penawaran dapat memenuhi standar yang berlaku dan menekan angka kecelakaan di area konstruksi khususnya. Penting bagi pemerintah untuk menrapkan sistem RKK penawaran yang memiliki elemen yang sesuai dengan standar ISRS. Serta membentuk sebuah team penilaian selama proses RKK berlangsung agar dapat menentukan tingkat risiko *subcontractor* di dalam sebuah pekerjaan. Bukan hanya pada PT X saja, namun diharapkan juga penerapan RKK penawaran ini yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sesuai PERMEN 10 tahun 2021, bisa di *hybrid* kedalam ISRS sehingga mampu meningkatkan kinerja keselamatan konstruksi pada *subcontractor*

yang efektif dan efisien untuk di seluruh perusahaan konstruksi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode delphi dengan skala likert yang dilakukan di salah satu perusahaan konstruksi yang ada di Jakarta pada bulan febuari 2022 – Juni 2022. Nilai pada penelitian kali ini mengacu kepada interval skala *Likert*. Metode skala *Likert* digunakan pada penelitian ini agar penilaian yang didapatkan lebih spesifik. Internal skala *Likert* terdapat pada table 1 di bawah ini:

Table 1. Interval Skala *Likert*

No	Jawaban	Keterangan
1	0% - 19,99%	Sangat Tidak Memenuhi
2	20% - 39,99%	Tidak Memenuhi
3	40% - 59,99%	Kurang Memenuhi
4	60% - 79,99%	Cukup Memenuhi
5	80% - 100%	Memenuhi

Sumber: Rensis Likert, 1932

Teknik pengumpulan data melalui proses dalam kelompok yang melibatkan interaksi antara peneliti dan sekelompok ahli terkait topik tertentu, biasanya melalui bantuan kuisisioner (Yousuf,2007). Pengamatan langsung di tempat kerja dan telaah dokumen perusahaan, dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 5 orang informan kunci yang terdiri dari 3 orang *HSE team* dan 2 orang *Operation team* serta questionnaire. Penelitian dengan metode delphi ini dilakukan sebanyak 2 putaran dengan memastikan kembali kepada seluruh pakar yang akan disepakati bersama.

Langkah penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode observasi dan panduan wawancara yang di susun berdasarkan, Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, PP Nomor 22 Tahun

2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan,UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan,UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi,Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.ISRS edisi 8,

Penilaian pelaksanaan yang telah dilakukan oleh perusahaan terhadap seleksi vendor ini dilakukan dengan berpedoman pada *international suistanibility rating system (ISRS)* dan melihat dari elemen apa saja yang diperlukan dalam pengembangan kebijakan dokumen yang ada di RKK penawaran.

HASIL

Berdasarkan pengamatan di lokasi penilitian dan menelaah beberapa dokumen perusahaan, dan peneliti akan menggunakan skala 1 s/d 5 berdasarkan tingkat pemenuhan elemen. Skala 1 sangat tidak memenuhi, skala 2 tidak memenuhi, skala 3 netral, skala 4 memenuhi, skala 5 sangat memenuhi,(Rensis Likert,1932). Skala tersebut yang akan disetujui oleh pakar. Didapatkan informasi mengenai program pencegahan, pengawasan, implementasi dan peningkatan mutu yang telah dilakukan oleh PT X dengan menggunakan proses yang terdapat pada *international sustainability rating system (ISRS)* adalah sebagai berikut:

Table 2. Proses Pencegahan, Pengawasan Implementasi Dan Peningkatan Mutu Di PT

X

Aktivitas	Penerapan	Informant					Rata -Rata
		1	2	3	4	5	
1. Tujuan	Ya	4	3	3	4	4	14.8
2. Kebijakan	Ya	2	1	2	1	2	6.4
3. Strategi	Ya	3	3	3	3	3	12.6
4. Keterlibatan Stakeholder	Ya	1	1	1	1	1	4.2
5. Proses Bisnis	Ya	3	3	3	3	3	12.6
6. Risiko Bisnis	Ya	3	4	3	3	2	13.4
7. Tanggung Jawab	Ya	2	2	3	2	2	9.4
8. Komitmen Manajemen	Ya	1	1	2	1	1	5.2
9. Kepemimpinan untuk Keselamatan Proses	Ya	3	2	2	2	2	9.4
Rata - rata total Penerapan							9.78%

Aktivitas	Penerapan	Informant					Rata -Rata
		1	2	3	4	5	
1. Identifikasi dan Evaluasi Bahaya Kesehatan	Ya	4	4	4	4	4	16.8
2. Identifikasi dan Evaluasi Bahaya Keselamatan	Ya	4	4	4	4	4	16.8
3. Identifikasi dan Evaluasi Bahaya Keamanan	Ya	4	4	4	4	4	16.8
4. Identifikasi dan Evaluasi Bahaya Lingkungan	Ya	4	4	4	4	4	16.8
5. Identifikasi dan Evaluasi Harapan - Harapan Pelanggan	Tidak	0	0	0	0	0	0
6. Evaluasi Risiko Tugas	Ya	4	4	4	4	4	16.8
7. Informasi Keselamatan Proses	Ya	4	4	4	4	4	16.8
8. Analisa Bahaya Proses	Ya	4	5	4	5	5	19
1. Identifikasi dan Evaluasi Bahaya Kesehatan	Ya	4	4	4	4	4	16.8
Rata - rata total Penerapan							14.98%

Aktivitas	Penerapan	Informant					Rata -Rata
		1	2	3	4	5	
1. Sistem Sumber Daya Manusia	Ya	2	2	2	3	3	9.6
2. Perekrutan	Ya	2	1	2	1	1	6.2
3. Mengelola Kinerja Individu	Tidak	0	0	0	0	0	0
4. Penghargaan dan Tindakan Disiplin	Tidak	0	0	0	0	0	0
5. Meninggalkan Organisasi	Tidak	0	0	0	0	0	0
6. Manajemen Perubahan Organisasi	Tidak	0	0	0	0	0	0
7. Sumber Daya Manusia untuk Keselamatan Proses	Ya	3	3	3	2	3	12.6
Rata - rata total Penerapan							4.06%

Aktivitas	Penerapan	Informant					Rata -Rata
		1	2	3	4	5	
1. Peraturan - Peraturan	Ya	4	3	4	3	4	14.8
2. Wewenang Ekstansi untuk Beroperasi	Tidak	0	0	0	0	0	0
3. Kode - Kode dan Standar Industri	Tidak	0	0	0	0	0	0
4. Pelaporan kepada Pihak yang Berwenang	Tidak	0	0	0	0	0	0
5. Keamanan Informasi	Tidak	0	0	0	0	0	0
6. Penilaian Pemenuhan	Ya	3	3	3	3	3	12.6
7. Peraturan Keselamatan Proses	Ya	3	4	2	1	3	10.6
8. Keamanan Informasi Proses	Tidak	0	0	0	0	0	0
Rata - rata total Penerapan							4.75%

Aktivitas	Penerapan	Informant					Rata -Rata
		1	2	3	4	5	
1. Koordiansi Proyek	Ya	4	4	4	3	3	15.6
2. Perencanaan Proyek	Ya	5	4	5	4	5	19
3. Pelaksanaan Proyek	Ya	4	4	4	4	4	16.8
4. Pengendalian Proyek	Ya	4	4	4	4	4	16.8
5. Penutupan Proyek	Ya	4	4	4	4	4	16.8
6. Tinjauan Keselamatan Proses untuk Proyek	Ya	4	3	3	3	4	13.8
Rata - rata total Penerapan							16.47%

Aktivitas	Penerapan	Informant					Rata -Rata
		1	2	3	4	5	
1. Sistem Pelatihan	Ya	4	4	4	4	3	16.6
2. Analisa Kebutuhan Pelatihan	Ya	4	4	4	3	4	15.8
3. Kompetensi Instruktur	Ya	4	4	3	3	2	14.4
4. Pelaksanaan Pelatihan	Ya	3	3	3	2	2	11.4
5. Orientasi / Induksi Kepemimpinan	Ya	3	2	2	1	1	8.2
6. Orientasi / Induksi Umum	Ya	3	2	2	1	1	8.2
7. Orientasi / Induksi Pekerjaan	Ya	3	2	2	1	1	8.2
8. Evaluasi Sistem Pelatihan	Ya	2	2	2	1	1	7.2
Rata - rata total Penerapan							11.25%

Aktivitas	Penerapan	Informant					Rata -Rata
		1	2	3	4	5	
1. Sistem Komunikasi	Ya	2	2	2	2	2	8.4
2. Koordinasi Rapat	Ya	2	2	1	1	2	6.4
3. Rapat Manajemen	Ya	2	1	1	1	2	5.4
4. Rapat Kelompok	Ya	2	1	1	2	1	6.2
5. Panitia / Dewan Gabungan	Ya	1	2	1	1	1	5.2
6. Bimbingan (<i>Coaching</i>)	Ya	1	1	1	2	1	5.2
7. Penghargaan	Tidak	0	0	0	0	0	0
8. Kampanye Penyuluhan	Ya	1	2	2	1	1	6.2
9. Informasi 'Jauh dari Pekerjaan'	Tidak	0	0	0	0	0	0
10. Kesadaran Keselamatan Proses	Ya	2	2	2	1	1	7.2
Rata - rata total Penerapan							5.02%

Aktivitas	Penerapan	Informant					Rata -Rata
		1	2	3	4	5	
1. Pengendalian Bahaya Kesehatan	Tidak	0	0	0	0	0	0
2. Pengendalian Bahaya Keselamatan	Ya	3	4	4	3	3	14.6
3. Pengendalian Bahaya Keamanan	Ya	3	3	4	3	3	13.6
4. Pengendalian Bahaya Lingkungan	Ya	4	5	4	3	4	16.8
5. Pengendalian Mutu Bahan dan Produk	Ya	3	3	3	4	4	13.8
6. Prosedur Operasional	Ya	4	4	4	4	5	17
7. Peraturan	Ya	4	5	5	4	4	18.8
8. Ijin Kerja	Ya	3	3	3	3	4	12.8
9. Tanda Bahaya dan Peringatan	Ya	4	4	4	4	4	16.8
10. Alat Pelindung Diri	Ya	4	4	4	4	5	17
11. Pengendalian Bahaya Proses	Ya	4	4	4	5	5	14.12
12. Prosedur Operasional untuk Pengendalian	Ya	4	4	3	3	4	14.8

Risiko Proses	
Rata - rata total Penerapan	13,90%

Aktivitas	Penerapan	Informant					Rata -Rata
		1	2	3	4	5	
1. Program Pemeliharaan	Tidak	0	0	0	0	0	0
2. Perencanaan dan Penjadwalan Pemeliharaan	Ya	2	2	1	1	1	6.2
3. Pelaksanaan Pemeliharaan	Ya	1	1	1	1	2	4.4
4. Peninjauan Pemeliharaan	Ya	1	1	1	1	1	4.2
5. Inspeksi Kondisi Umum	Ya	1	1	1	1	1	4.2
6. Inspeksi Peralatan yang Khusus	Ya	1	1	1	1	1	4.2
7. Inspeksi Peralatan Sebelum Digunakan	Ya	1	1	1	1	1	4.2
8. Manajemen Perubahan Rekayasa	Ya	1	1	1	1	1	4.2
9. Peralatan Inspeksi, Pengukuran, dan Pengujian	Ya	1	1	1	1	1	4.2
10. Akuisisi dan Penjualan	Tidak	0	0	0	0	0	0
11. Program Integritas Aset	Tidak	0	0	0	0	0	0
12. Inspeksi Keselamatan Proses	Ya	1	1	1	1	1	4.2
Rata - rata total Penerapan							3.33%

Aktivitas	Penerapan	Informant					Rata -Rata
		1	2	3	4	5	
1. Pemilihan Kontraktor / Pemasok	Tidak	0	0	0	0	0	0
2. Operasional Kontraktor	Tidak	0	0	0	0	0	0
3. Jaminan Kontraktor / Pemasok	Tidak	0	0	0	0	0	0
4. Rantai Pasokan dan Pembelian	Tidak	0	0	0	0	0	0
5. Logistik	Tidak	0	0	0	0	0	0
6. Manajemen Kontraktor di Wilayah Proses	Tidak	0	0	0	0	0	0
Rata - rata total Penerapan							0%

Aktivitas	Penerapan	Informant					Rata -Rata
		1	2	3	4	5	
1. Penilaian Keadaan Darurat	Ya	3	3	3	4	3	13.6
2. Rencana Tanggap Darurat di Lapangan	Ya	3	3	3	3	3	12.6
3. Rencana Tanggap Darurat di luar Lapangan	Ya	2	3	3	2	2	10.4
4. Rencana Penanganan Krisis	Ya	2	2	3	2	2	9.4
5. Rencana Kelangsungan Bisnis	Ya	2	3	2	3	3	10.6
6. Tinjauan Rencana Tanggap Darurat	Ya	3	2	2	1	1	8.2
7. Komunikasi Pada Saat Keadaan Darurat	Ya	3	2	1	1	1	7.2
8. Sistem Proteksi Keadaan Darurat	Ya	3	3	3	2	2	11.4
9. Pengendalian Energi	Ya	3	2	3	3	2	11.4
10. Tim Tanggap Darurat	Ya	2	3	2	2	2	9.4
11. Drill dan Latihan	Ya	2	2	2	1	1	10.42
12. Pertolongan Pertama	Ya	2	3	2	3	2	10.4
13. Bantuan Medis	Ya	2	2	3	2	3	9.6
14. Bantuan dan Kerjasama dari Pihak Luar yang Terorganisir	Ya	3	2	3	1	3	9.6
15. Persiapan untuk Kecelakaan Besar	Ya	3	3	2	2	2	10.4
Rata - rata total Penerapan							10.31%

Aktivitas	Penerapan	Informant					Rata -Rata
		1	2	3	4	5	
1. Sistem Belajar dari Kejadian	Ya	2	3	2	3	3	10.6

2. Belajar dari Keberhasilan / Sukses	Ya	3	3	2	3	2	11.4
3. Partisipasi dalam Investigasi	Ya	2	3	3	3	3	11.6
4. Kondisi Substandar	Ya	3	2	3	2	2	10.4
5. Pengelolaan Keluhan	Ya	2	3	2	2	2	9.4
6. Pengumuman Kejadian	Ya	3	2	3	3	3	11.6
7. Kecelakaan di Luar Tempat Kerja	Ya	2	2	2	3	3	9.6
8. Tindak Lanjut	Ya	2	2	3	2	2	9.4
9. Verifikasi Pelaporan Belajar dari Kejadian	Ya	2	2	2	3	3	9.6
10. Analisa Kejadian	Ya	3	3	2	3	3	11.6
11. Tim Perbaikan	Ya	3	2	3	3	2	11.4
Rata - rata total Penerapan							10.6%

Aktivitas	Penerapan	Informant					Rata -Rata
		1	2	3	4	5	
1. Pemantauan Bahaya Kesehatan	Tidak	0	0	0	0	0	0
2. Pemantauan Bahaya Keselamatan	Ya	2	2	2	3	2	9.4
3. Pemantauan Bahaya Keamanan	Ya	3	2	3	2	2	10.4
4. Pemantauan Bahaya Lingkungan	Ya	2	3	2	3	3	10.6
5. Kepuasan Pelanggan	Tidak	0	0	0	0	0	0
6. Keefektifan Pemantauan	Ya	3	2	3	3	2	11.4
7. Survey Persepsi	Ya	2	2	2	1	2	7.4
8. Observasi Tingkah Laku	Ya	3	2	2	2	2	9.4
9. Observasi Tugas	Ya	3	3	3	2	2	11.4
10. Audit	Ya	2	2	3	2	2	9.4
11. Pemantauan Bahaya Proses	Ya	2	2	3	3	3	10.6
Rata - rata total Penerapan							8.18%

Aktivitas	Penerapan	Informant					Rata -Rata
		1	2	3	4	5	
1. Hasil Bisnis	Ya	3	2	3	2	3	10.6
2. Tinjauan Manajemen	Ya	4	3	4	5	4	16.8
3. Pelaporan kepada Pihak - pihak yang Berkepentingan (Stakeholder)	Ya	4	3	3	2	3	12.6
4. Manajemen Sisa Risiko	Ya	4	5	4	5	4	18.8
Rata - rata total Penerapan							14.70%

Berdasarkan tabel 2 , hampir di seluruh elemen di perlukannya mitigasi dalam pengembangan *process safety* dengan metode RKK yang telah di bandingkan oleh sistem ISRS. Pengembang metode ini diperlukan agar seluruh kebutuhan dokumen yang ingin di implementasikan dalam sebuah *project* dapat di buktikan pada tahapan awal seleksi vendor. Sehingga, si pemberi kerja bisa memastikan bahwa *process safety* yang di miliki perusahaan telah mencakup seluruh poin yang akan menimbulkan dampak buruk bagi pekerja, perusahaan, maupun relasi.

Mutu

Berdasarkan Tabel 3 persentase yang didapatkan, diketahui bahwa PT X dalam tahapan seleksi vendor masih dalam persentase yang sangat kecil dalam pemenuhan keijakan dokumen mengacu pada dokumen *International Sustainability Rating System (ISRS)* sebagai *process safety* yang telah dilakukan di tempat kerja. Dari hasil persentase yang didapatkan yaitu sebesar 8,98% dalam kategori sangat tidak memenuhi kinerja keselamatan konstruksi bagi *subcontractor*

Elemen	Nilai Persentase Implementasi	Peringkat yang diperlukan <i>Improvement</i>
Manajemen Kontraktor dan Pembelian	0	1
Manajemen Aset	3,33%	2
Sumber Daya Manusia	4,06%	3
Jaminan Pemenuhan	4,75%	4
Komunikasi Promosi	5,02%	5
Perencanaan Administrasi	7,37%	6
Pemantauan Risiko	8,18%	7
Kepemimpinan	9,78%	8
Belajar dari Kejadian	10,6%	9
Rencana Tanggap Darurat	10,31%	10
Pelatihan & Kompetensi	11,25%	11
Pengendalian Risiko	13,90%	12
Hasil dan Tujuan	14,70%	13
Evaluasi Risiko	14,98%	14
Manajemen Proyek	16,47%	15
Rata – Rata Persentase Pemenuhan	8,98%	

PEMBAHASAN

Dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan selamat. Di seluruh organisasi dunia telah melakukan berbagai cara penelitian sebagai proses pencegahan, pengawasan, dan peningkatan mutu. Ini juga di fokuskan kepada seluruh sektor industry, terkhususnya di sektor konstruksi yang selalu mendominasi di setiap tahunnya untuk tingkat kecelakaan yang tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan kebijakan dokumen *international sustainability rating system* (ISRS) terdapat 15 proses yang patut

dipertimbangkan dan di jalankan. Sehingga, dari tahapan proses tersebut bisa di lihat bahwa sebuah perusahaan ataupun vendor khususnya, memiliki sebuah proses sistem yang baik atau tidak, dijalankan atau tidak, dan di pantau atau tidak. Sehingga, persamaan proses inilah yang di harapkan agar dalam sebuah pekerjaan proses tersebut terus berjalan aktif dengan sendirinya.

Hasil penelitian terhadap *process safety* di PT X, dalam hal pencegahan, pengawasan dan peningkatan mutu pada tahapan seleksi vendor yang mengacu pada *international sustainability rating system* (ISRS), diketahui bahwa PT X termasuk dalam pemenuhan kriteria dokumen yang masih sangat rendah yaitu 8,98%.

Manajemen Kontraktor dan Pembelian

Pemilihan subkontraktor oleh kontraktor inti atau utama dapat dilakukan dengan 2 cara (Messah, et al.,2009) , yaitu:

Penunjukan secara langsung

Subkontraktor sudah diikat dengan sebuah kesepakatan pada saat proses tender atau bila diperkirakan subkontraktor tersebut yang paling memenuhi syarat.

Melakukan tender

Jumlah calon subkontraktor lebih dari satu, dan dilakukan kualifikasi khusus untuk penentuan pemenang. Kualitas dari konstruksi, pengontrolan terhadap hasil kerja, sistem koordinasi di proyek, modal, cara pembayaran, sejarah perbankan, pengalaman berhubungan dengan tuntutan atau klaim dan frekuensi kegagalan dalam memenuhi kontrak tepat waktu (shiau, yan-chyuan et al., 2006). Kriteria yang digunakan untuk memilih subkontraktor adalah mulai dari harga penawaran, kinerja masa lalu, catatan keselamatan dan kesehatan kerja, kemampuan keuangan, pekerjaan yang dikerjakan saat ini, reputasi perusahaan, sumber daya manusia, sumber daya peralatan dan perlengkapan, kemampuan teknis serta usia perusahaan (lavelle, derek et al., 2007).

Peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah dan peraturan menteri pekerjaan umum tentang pedoman kualifikasi pelanggan nasional pekerjaan jasa pelaksanaan konstruksi (pemborong) nomor: 43/prt/m/2007, maka kriteria-kriteria untuk pemilihan subkontraktor dapat dikelompokkan ke dalam 6 aspek, antara lain aspek umum, finansial, teknis, manajerial, keselamatan kerja dan aspek reputasi perusahaan, yang dianggap cukup memberikan informasi untuk pemilihan subkontraktor.

Aspek Umum

Berhubungan dengan informasi administratif dari subkontraktor dan memiliki tujuan agar dapat memperoleh gambaran singkat tentang legalitas dan status hukum dari perusahaan subkontraktor.

Aspek Keuangan

Bertujuan untuk mengidentifikasi keadaan keuangan dari subkontraktor itu sendiri, serta menentukan seberapa besar kekuatan modal kerja perusahaan dan juga seberapa besar nilai penawaran dari calon subkontraktor.

Aspek Teknis

Tujuan dari aspek ini adalah untuk mengukur apakah subkontraktor tersebut mempunyai kemampuan perihal teknis dasar, pengalaman dan pengertian untuk persyaratan-persyaratan pelaksanaan proyek.

Aspek Manajerial

Aspek ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem manajemen ditangani secara professional dalam rangka mencapai hasil karya yang optimal sehingga dapat memenuhi target proyek.

Aspek Keselamatan Kerja

Memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mengantisipasi kecelakaan kerja yang mungkin timbul dalam pelaksanaan proyek.

Aspek Reputasi Perusahaan

Berhubungan dengan klaim atau tuntutan yang pernah terjadi dan di alami serta frekuensi kegagalan dalam memenuhi kontrak tepat waktu.

Berdasarkan hasil penelitian dan dari beberapa pakar peneliti serta regulasi yang ada di Indonesia. Manajemen kontraktor dan pembelian ini harus di lakukan, bukan hanya dari pemberi kerja atau pengawas saja melainkan dari pelaksana juga harus diketahui bagaimana proses mereka melakukan untuk memilih, memeriksa dan mengevaluasi vendor atau subkontraktor yang mereka miliki di dalam pekerjaan mereka. Nilai dari hasil penelitian di dapatkan sangat jauh dari kata memenuhi sehingga, perlunya pengawasan terkait program terkait manajemen kontraktor ini bisa dilakukan dan berjalan sesuai aturan. Sehingga, baik dari pelaksana ke subkontraktor yang di tunjuk bisa sama – sama memastikan untuk bekerja dengan sesuai kaidah *safety* yang berlaku.

Manajemen Aset

Aset manajemen adalah manajemen aset yang baik dalam hal mengukur nilai properti (aset) dalam istilah moneter dan menggunakan jumlah pengeluaran minimum untuk pengelolaannya, Britton, Connellan, dan Croft (1989) dalam Siregar (2004: 517). Mengoptimalkan pemanfaatan aset dalam hal manfaat layanan dan pengembalian finansial, Doli D. Siregar (2004). Sehingga pengelolaan asset membutuhkan 3M, antara lain: Meminimalkan biaya kepemilikan, Memaksimalkan ketersediaan asset, Memaksimalkan penggunaan asset

Manajemen aset adalah istilah umum yang digunakan pada bidang keuangan, real estat, ruang bangunan, alokasi sumber daya dan sejumlah bidang lain yang berarti memaksimalkan pemanfaatan dan pengembalian aset, terutama keuangan, Mitchell dan kawan – kawan (2006:1). Serangkaian aktivitas manajemen aset yang mencakup identifikasi aset yang

diperlukan, identifikasi kebutuhan pendanaan, penyediaan dukungan sistem logistik, dan pemeliharaan untuk aset serta penghapusan atau pembaruan aset. Tahapan kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis dan terintegrasi sehingga efektif dan efisien untuk memenuhi tujuan yang di harapkan, Hasting (2010: 4).

Tujuan manajemen asset Menyediakan layanan yang dibutuhkan, Optimalisasi potensi layanan yang dihasilkan oleh asset, Maksimalisasi nilai asset, Kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, Memenuhi resposibilitas dan akutanbilas, Kejealsan kepemilikan dan kontrol atas asset

Sehingga, keutamaan dari manajemen aset merupakan bentuk sebuah keputusan untuk mengelola serta meminimalisasi biaya kepemilikan, memaksimalkan ketersediaan aset dan penggunaannya yang melewati dalam perencanaan kebutuhan, pengadaan, inventaris, kepemilikan atau legal audit, penilaian, pengoperasian, pemeliharaan, penghapusan, peremajaan, pengalihan, dan juga sebagai bentuk pengawasan aset untuk mendukung tujuan organisasi dalam pelayanan dan ramah lingkungan. Temuan yang didapatkan dilapangan adalah manajemen aset tidak pernah di pertanyakan ke dalam dokumen RKK penawaran, sehingga pihak *assessor* tidak bisa mendeteksi atau mengidentifikasi terkait aset kerja yang di miliki oleh subcontarcor apakah talah sesuai standar dan bisa sebagai penunjang pekerjaan atau tidak.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai penggerak pada kegiatan organisasi. *“People are the most important resource of an organization. They supply the talent, skills, knowledge, and experience to achieve the organization’s objective”* yang dimana manusia merupakan sumber daya yang paling penting dari sebuah organisasi (Gaol,2014:14). Dan manusia juga berperan sebagai pemberi bakat, keahlian,

pengetahuan dan pengalaman untuk terciptanya tujuan di sebuah organisasi.

Pendayagunaan SDM di sebuah organisasi yang dilakukan melalui fungsi – fungsi perencanaan SDM, perencanaan dan pengembangan karir, pemberian kompensasi dan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja serta hubungan industrial, Marwansya (2010). Manajemen SDM bisa juga disebut sebagai manajemen personalia yaitu sebagai perencana, pengorganisasian, pengarahan dan pemutusan hubungan kerja, pengembangan kompensasi, integritas, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan SDM untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi dan dalam masyarakat, Edwin B. Flippo (1994).

Dalam point SDM ini, yang ditemukan dalam lapangan adalah seringnya pemberi kerja tidak pernah menanyakan terkait program atau sistem SDM yang ada diperusahaan. Sehingga sulitnya mengukur efektivitas dan efesiensi SDM dalam perusahaan tersebut.

Perencanaan dan Administrasi

Perencanaan merupakan pemulihan fakta dan usah yang dihubungkan antara fakta yang satu dengan yang lainnya, dan kemudian membuat perkiraan dan peramalan terkait keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya menghendaki hasil yang diinginkan (George R.Terry). Perencanaan juga merupakan suatu pengambilan keputusan pendahuluan mengenai apa yang harus dikerjakan dan merupakan langkah – langkah sebelum kegiatan dilaksanakan (W. H. Newman). Tidak hanya sebatas perencanaan saja, penunjang dari sebuah rencana tersebut harus memiliki administrasi yang baik, yang dimana administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara 2 orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang Siagian, 2004).

Secara sistematis untuk membentuk sebuah jaringan yang saling bekerjasama satu sama lainnya untuk mendukung terwujudnya dan mencapai tujuan yang diharapkan sebelumnya, Fahmi (2015:1). Kegiatan administrasi tersebut meliputi aspek – aspek sebagai berikut Renacana bisnis, produk atau barang yang akan dilakukan, Keputusan tentang rencana kapasitas bisnis dan produk itu sendiri, System penyediaan, penyimpanan dan juga logistik produksi, Serta perencanaan kebutuhan dan juga kualitas bisnis dan produk itu sendiri (QC).

Perencanaan dan administrasi pada proses RKK, hanya ditemukan yang berjalan yaitu perihal rencana bisnis dan rencana keselamatan proses. Sistem dokumentasi yang seringkali tidak di pertanyakan apakah telah di sosialisasikan dan pekerja mengetahui serta terkait rencana keselamatan dan perencanaan pengendalian kerja juga terjadi hal demikian.

Jaminan Pemenuhan

System penjaminan mutu yang efektif di lembaga Pendidikan akan memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Struktur dan manajemen organisasi, budaya dan disiplin individu memberikan pengaruh terhadap hasil penjaminan mutu (Haapakorpi,2011). Mengidentifikasi dan menemukan informasi yang relevan dengan tema penjaminan mutu, kemudian menganalisis hasil temuan, dan kemudian mengembangkan dan mengekspresikannya menjadi temuan baru terkait dengan penjaminan mutu (Masrukhin, 2015).

Pada temuan dilapangan, banyaknya point yang ada di sub bab elemen pada ISRS masih banyak belum terpenuhi dan sebagian sub elemen telah berjalan akan tetapi belum secara keutuhan. Perlunya pemenuhan ini agar, si pemberi kerja ataupun pelaksana dapat memenuhi standar sesuai dengan ISO 9001.

Komunikasi dan Promosi

Komunikasi dan promosi merupakan bagian elemen yang tidak dapat terpisahkan dalam mengetahui

implementasi dalam sebuah proses. Dalam sebuah proses penyampaian informasi memiliki pesan dari komunikator kepada komunikas (Suprpto, 2009). Proses komunikasi yang bisa dilakukan melalui verbal ataupun juga non verbal pada dalam sebuah pemikiran dan ataupun pemahaman yang akan disampaikan dalam antar dividu, atau organisasi dengan individu yang bertujuan untuk mengubah baik itu tingkah laku, tujuan ataupun hasil. Komunikasi sangat berkaitan dengan promosi, karena dalam proses promosi selalu dihubungkan dalam komunikasi yang dimana dalam upaya agar bisa membujuk orang untuk menerima produk, konsep dan gagasan (Harper Boyd, 2000). Komunikasi dan promosi merupakan salah satu poin yang dapat memastikan agar sebuah informasi dapat tersampaikan dengan baik. Komunikasi dan promosi sebagai penunjang agar proses implementasi dalam sebuah program dapat tercapai. Faktanya, temuan dilapangan terkait komunikasi dan promosi sangat jarang dipertanyakan. Menunjukkan bahwa, sulitnya mengetahui program yang telah dirancang dalam sebuah perusahaan telah tersampaikan dengan baik oleh pekerja atau tidak.

Belajar dari kejadian

Pada poin ini, telah di lakukan dalam tahapan RKK yang dimasukkan ke dalam dokumen SOP terkait tanggap darurat. SOP yang hanya bersifat general yang belum bisa memastikan apakah telah tersampaikan dan terimplementasikan dengan baik. SOP dapat mempengaruhi kinerja individu ataupun karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan dan merupakan sebuah panduan yang dipergunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan bisa berjalan dengan lancar (Sailendra (2015:11). Pemberi kerja tidak dapat mengetahui implementasi dari sebuah SOP yang telah dibuat dalam sebuah kejadian yang telah dialami oleh perusahaan terkait pembuatan pelaporan, verifikasi pelaporan

serta tindak lanjut dari laporan itu sendiri. Sehingga batasan pemahaman untuk pekerja sulit dinilai dan diketahui dalam proses penerapannya.

Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dalam proses RKK telah dilakukan tetapi belum maksimal. Penilaian terkait pemenuhan dari sisi *health, safety and environment (HSE)* belum terlaksana dengan baik, dikarenakan proses yang telah dimiliki tidak dapat diketahui apakah telah disampaikan atau tidak kepada para pekerja. Pemantauan ini tidak hanya dilakukan pada aspek HSE saja, melainkan penerapan keefektifan program ini serta sampai umpan balik dari pemberi kerja perlu di miliki sebagai *track record* perusahaan. Proses dan program pemantauan risiko sangat diperlukan sebagai gambaran dalam sebuah kondisi tertentu yang sedang berlangsung dalam sebuah perusahaan serta pelaporan mengenai pemenuhan terhadap sekumpulan standar yang telah terdefinisi (ICASA dalam Sarno, 2009:3).

Kepemimpinan

Cara kepemimpinan dan budaya menciptakan lingkungan yang terbuka untuk proses keamanan. CEO dan pemimpin harus memberikan kebijakan tentang tata kelola perusahaan untuk keselamatan proses yang menggambarkan manajemen harapan, komitmen yang dibutuhkan, dan aktivitas perusahaan dalam kaitannya dengan keamanan proses (Webb, 2008). Dalam kaitannya dengan kesadaran risiko, harus ada pemahaman yang jelas tentang kerentanan dan risiko (Hendershot et al., 2011). Penting juga bahwa manajemen memiliki pengetahuan tentang keselamatan proses sepanjang siklus hidup, mengidentifikasi berbagai lapisan perlindungan dalam sistem proses, memastikan sistem manajemen yang konsisten, menilai risiko pengurangan anggaran pada keselamatan proses, dan bertanggung jawab atas perencanaan darurat (OECD, 2017). Demikian pula,

CEO dan pemimpin harus memastikan bahwa keselamatan proses program didorong oleh data penting yang secara proaktif mencari informasi berkaitan dengan keselamatan proses (audit, indikator kinerja, bahaya dan risiko yang melekat, tren berbahaya, pengendalian risiko yang efektif, manajemen kontraktor, dll). Manajemen harus memastikan bahwa program keselamatan proses cukup kuat untuk menjamin organisasi kompetensi untuk mengelola bahaya operasinya. Program keselamatan proses memastikan bahwa organisasi pemimpin terlibat dalam mengartikulasikan dan mendorong pemantauan dan rencana aktif.

Peran pemimpin di perusahaan merupakan ujung tombak perusahaan yang dimana, sebagai penentu arah kemana perusahaan tersebut akan berjalan. Seluruh kebijakan, prosedur ataupun dokumen terkait tentang perusahaan sepatutnya di komunikasikan dan di sampaikan kepada pekerja, agar menjadi tolak ukur dalam standar bekerja di suatu perusahaan.

Pelatihan dan Kompetensi

Pelatihan dan kompetensi belum terimplementasi dengan baik. Pengukuran yang diberikan dalam RKK hanya menunjukkan atau menampilkan dari pelatihan dan kompetensi yang dibutuhkan tetapi tidak di ukur bagaimana hasil dari pelatihan yang telah diberikan serta pementuan standar pelatih yang disediakan. Proses pembelajaran yang dirancang untuk mengubah kinerja seseorang dalam melakukan pekerjaan (Afandi, 2018). Pelatihan yang telah diberikan selaras dengan kompetensi yang sesuai atau yang diperlukan oleh pekerja. Karakteristik dari seseorang akan selalu berkaitan dengan efektivitas kinerja dalam individu di setiap pekerjaan atau karakteristik dasar individu yang dimiliki sebagai sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif, atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu, (Moehariono, 2010).

Rencana Tanggap Darurat

Pada proses ini sama halnya yang terjadi pada poin belajar kejadian di ISRS. Dalam proses RKK pada poin rencana tanggap darurat hanya melampirkan sebuah dokumen yang berbentuk SOP perusahaan. Sulitnya mengetahui program yang telah di rancang dalam SOP apakah telah berjalan atau tidak. Serta terkadang dalam SOP rencana tanggap darurat yang diberikan belum mencakup keseluruhan dari kejadian apa saja yang akan ditemui selama dalam pekerjaan. Termasuk pelatihan pertolongan pertama apakah telah dilakukan sebelumnya tau belum sehingga, pada saat kejadian si pemberi kerja bisa meyakini bahwa si pelaksana telah memahami dengan baik. Bukti implementasi program sangat diperlukan, sebagai bukti program telah dilaksanakan dan di lakukan sesuai SOP dan peraturan yang berlaku dan juga implementasi ini di tujukan untuk tercapainya tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, (Mulyadi, 2015:12).

Hasil dan Tujuan

Hasil dan tujuan diperlukan untuk mengetahui atas apa yang telah di capai oleh sebuah perusahaan. Proses ini perlunya di pantau untuk mengetahui apa yang telah dilakukan tercatat dan di rekam oleh perusahaan. Mulai dari apa yang telah di gapai, orang – orang yang terlibat serta dari beberapa poin yang diperlukan *improvement*.

Evaluasi dan Pengendalian Risiko

Evaluasi dan pengendalian risiko, 2 poin yang terdapat ISRS yang perlu dan harus diterapkan. Evaluasi dan pengendalian risiko yang telah di tetapkan dan diterapkan pada sistem RKK penawaran merupakan hanya pengendalian risiko sesuai ruang lingkup pekerjaan vendor tanpa bukti evaluasi atau pembaharuan dokuan terkait pengendalian yang telah dilakukan. Evaluasi dan identifikasi harapan *customer* ataupun *client* tidak pernah dipertanyakan dan juga

tidak ada *track record* data terkait kan hal itu. Memberikan informasi yang optimal, manfaat yang di capai dari evaluasi serta peningkatan kualitas dari apa yang telah di gapai merupakan kunci utama dari evaluasi, (Ginting Abdorrrakhman, 2008).

Manajemen Proyek

Elemen pada ISRS terkait manajemen proyek dalam penerapan di RKK penawaran telah dilakukan akan tetapi perlu dilakukan konsistensi, komitmen dalam tahapan ini. Pada tahapan ini perlunya dilakukan di awal terkait perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap kegiatan proyek dengan mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu hasil yang memuaskan, (Ervianto, W. I, 2002).

KESIMPULAN

Proses RKK penawaran yang telah dilakukan belum membuktikan bahwa kebijakan tersebut, telah mencakupi seluruh *gaps* yang ada. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan beberapa *gaps* ditemukan, mulai dari manajemen kontraktor dan pembelian, manajemen aset, sumber daya manusia, perencanaan dan administrasi, jaminan pemenuhan, komunikasi dan promosi, belajar dari kejadian, pemantauan risiko, kepemimpinan, pelatihan dan kompetensi, rencana tanggap darurat, hasil dan tujuan, evaluasi dan pengendalian risiko serta manajemen proyek. Keperluan dari poin tersebut juga harus dipantau oleh si pemberi kerja dan membentuk sebuah *assessor team*, agar dapat memastikan dan menentukan nilai atas apa yang telah di gapai atau dilakukan oleh vendor sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya. Bukti implementasi, pemantauan serta evaluasi tidak terlampir dalam setiap poin yang ada. Keperluan dokumen tersebut juga dapat mengukur tingkat kinerja keselamatan konstruksi subkontraktor.

Sehingga, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Disarankan untuk dari sisi pemerintah dan si pemberi kerja, agar memaksimalkan dan melebarkan serta lebih mendalam lagi dari kebijakan dokumen RKK penawaran pada PERMEN PUOR No 10 Tahun 2021.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada PT X, kepada Program Studi Magister Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, kepada Program Studi Magister Teknik Fakultas Teknik Sipil Universitas Indonesia dan kepada Ibu drg. Baiduri Widanarko, M.K.K.K., Ph.D selaku dosen pembimbing 1 akademik dan Bapak Dr. Rossy Army Machfudiyanto, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing ke 2 akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdorrahman, Gintings. *Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran: Buah Batu Bandung tahun 2008*.
- Abdul-Rashid, I., Bassioni, H. and Bawazeer, F. (2007) "Factors Affecting Safety Performance in Large Construction Contractors in Egypt", *Association of Researchers in Construction Management, ARCOM 2007 - Proceedings of the 23rd Annual Conference*, 2(September), pp. 661–670.
- Afandi, P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- Bird FE, Germain GL, Clark MD. *Practical Loss Control Leadership*. Atlanta, USA: International Loss Control Institute, Inc; 2003.
- Boyd, Harper W. 2000. *Manajemen Pemasaran "suatu pendekatan strategis dengan orientasi global"*, Jakarta : Erlangga.
- Cheng, C.-W., Yao, H.-Q., Wu, T.-C., 2013. *Applying data mining techniques to analyze the causes of major occupational accidents in the petrochemical industry*. *J. Loss Prev. Process. Ind.* 26, 1269–1278. <https://doi.org/10.1016/j.jlp.2013.07.002>.
- Erivianto, W . I. 2002. *Manajemen Proyek Konstruksi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Ervianto, W. I. 2002. *Teori Aplikasi Manajemen Proyek Konstruksi*, Andi, Yogyakarta.
- EPSC, 2018. *European Process Safety Centre - Objectives*. <http://epsc.be/Objectives.html>.
- Flippo, Edwin B. 1994. *Personnel Management*, 6th Edition. New York: McGraw-Hill.
- Fahmi, Irham. (2014). *Manajemen produksi dan Operasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Gaol L, Jimmy. 2014. *A to Z Human Capital : Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Grasindo : Jakarta.
- George R.Terry,, dan Leslie.W.Rue, *Dasar-Dasar Manajemen*, alih bahasa, G.A. Ticoalu, Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Hasting, A. J. dan Nicholas Hastings. 2010. *Physical Asset Management*. Queensland University of Technology.
- Hastings, Nicholas A.J. 2010. *Physical Asset Management*. Springer: Australia.
- Haapakorpi, A. (2011). *Quality Assurance Processes in Finnish Universities: Direct and Indirect Outcomes and Organisational Conditions*. *Quality in Higher Education*, 17(1), 69–81. <https://doi.org/10.1080/13538322.2011.554311>

- Henderson A, et al. (2011) Dependence of proteasome processing rate on substrate unfolding. *J Biol Chem* 286(20):17495-502
- Hendershot et al. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2011, 6:17. <http://www.substanceabusepolicy.com/content/6/1/17>
- Hsu, W.-K.K., Huang, S.-H.S., Yeh, R.-F.J., 2015. *An assessment model of safety factors for product tankers in coastal shipping*. *Saf. Sci.* 76, 74–81. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2015.02.022>.
- ISO 9001: 2015. *Quality Management*.
- ISO 14001:2015. *Environmental Management*.
- ISO 45001:2018. *Occupational Health and Safety*.
- ISRS *International Sustainability Rating System, edition 8*. 2009
- Ismail, Z., Kong, K.K., Othman, S.Z., Law, K.H., Khoo, S.Y., Ong, Z.C., Shirazi, S.M., 2014. *Evaluating accidents in the offshore drilling of petroleum: regional picture and reducing impact*. *Measurement* 51, 18–33. <https://doi.org/10.1016/j>.
- Lavelle, Derek et al. (2007). *The Selection Of Subcontractors: Is Price The Major Factor?*, School of the Built Environment Northumbria University.
- Marwansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Masrukhin. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Kudus: Media Ilmu Press.
- Messah, A. Y., Pono, D. R. R. & Krisnayanti, S. D., 2009. *Dinamika TEKNIK SIPIL. Kajian Kriteria Pemilihan Subkontraktor Oleh Kontraktor Utama Menggunakan Metode Analytical Hierachy Process (AHP)*, p. 94.
- Moeheriono, 2010, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*, Cetakan kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta
- OECD *Economic Surveys Indonesia. Survei Ekonomi OECD Indonesia 2015*. www.oecd.org/eco/surveys/economic-surveyindonesia.htm - Diakses Oktober 2017
- PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan PP Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.
- Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Kualifikasi Pelanggan Nasional Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborong).
- Sailendra, Annie. 2015. *Langkah-Langkah Praktis Membuat SOP*. Trans Idea Publisng: Jogjakarta.
- Sarno, Riyanarto. 2009. *Audit Sistem & Teknologi Informasi*. Surabaya: ITS Press.
- Sarno, R. dan Iffano, I. 2009. *Sistem Manajemen Keamanan Informasi*. Surabaya: ITS Press.

- Shiau, Yan-chyuan et al. 2006. Use Questionnaire And AHP Techniques To Develop Subcontractor Selection System, Journal Department of Construction Engineering Chung Hua University.
- Siagian, Sondang P. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara
- Siregar, Doli D. 2002. *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara: Peran Konsultan Penilai dalam Pemulihan Ekonomi Nasional*.
- Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*. Satyatama Graha Tara.
- Suprpto, Tommy (2009), *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*, Cet 1, Yogyakarta : Media Pressindo.
- There are no sourc Theophilus, S.C., Nwankwo, C.D., Acquah-Andoh, E, Bassey, E, Umoren, U., 2018. *Integrating human factor (HF) into a process safety management system (PSMS)*. *Process Saf. Prog.* 37, 67-85. <https://doi.org/10.1002/prs.11909>
- Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- Webb, D.J., Mohr, L.A. and Harris, K.E. (2008) A Re-Examination of Socially Responsible Consumption and Its Measurement. *Journal of Business Research*, 61,91-98. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2007.05.007>
- William H. Newman, *The Process of Management* (London: Prentice Hall, Inc., 1961), p. 261.
- Yousuf, Muhammad Imran (2007) "The Delphi Technique", *Essays in Education*: Vol. 20: Iss. 1, Article 8.